



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN NEGERI MERAUKE

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NATALIA MAHARANI  
2. Jabatan : WAKIL KETUA  
3. NHK : 481217

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.410.400.000

1. Tanah Seluas 140 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 1138 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 910.400.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 725.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY GD8VTI AT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, AGYA SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 75.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 49.538.907

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 4.259.938.907

**III. HUTANG** Rp. 130.096.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.129.842.907

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.